



## PENGARUH PAD, DAU DAN DAK TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL

Sheila Ardhan Nuarisa 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*

Diterima Desember 2012  
Disetujui Januari 2013  
Dipublikasikan Februari 2013

*Keywords:*

**Capital Expenditure  
General Allocation Fund  
Regional Income  
Special Allocation Fund**

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Populasi dalam penelitian ini adalah dokumen Laporan Realisasi APBD pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2011. Penelitian ini adalah penelitian populasi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumenter. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Bagi Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan komponen-komponen PAD agar PAD dapat meningkat sehingga alokasi untuk belanja modal dapat ditambah.

### Abstract

*The purpose of this study to examine the effect of regional income, the General Allocation Fund, and Special Allocation Fund for capital expenditure budget allocation. The population in this study is to document the local government budget realization report the district/town in Central Java. This study is a population with a method of data collection is done with the documentary method. Analysis of the data used multiple regression. The result indicate that the of regional income, the General Allocation Fund, and Special Allocation Fund have any effect on capital expenditure budget allocation. For the local governments are expected to increase Regional Income components so Regional Income can be increased so that the allocation for capital expenditure can be added.*

© 2012 Universitas Negeri Semarang

 Alamat korespondensi:

Gedung C6 Lantai 1 FE Unnes Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229  
E-mail: [Rashelquw@yahoo.co.id](mailto:Rashelquw@yahoo.co.id)

## Pendahuluan

Sejak pemerintahan Indonesia dilanda krisis ekonomi pada awal tahun 1997 membuat perekonomian terpuruk dan mendorong pemerintah untuk melepas sebagian wewenang pengelolaan keuangan kepada daerah dan diharapkan daerah dapat membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat atas dasar kemampuan sendiri. Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan Pemerintah Daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah, kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki daerah secara efisien dan efektif, dan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Otonomi daerah menciptakan kemandirian untuk membangun daerah secara optimal dan tidak lagi terkonsentrasi di pusat sehingga meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah serta memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif di daerah.

Belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung (permendagri nomor 25 tahun 2009), merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan otonomi daerah. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka menghadapi desentralisasi fiskal. Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Pemerintah Daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana yang digunakan untuk masing-masing program

kegiatan. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar dkk.2008). Namun faktanya Pemerintah Daerah dalam pengalokasian pendapatan daerah cenderung digunakan untuk keperluan belanja rutin daripada belanja modal. Hal tersebut dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010. Kegiatan belanja (pengeluaran) Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Untuk membiayai pengeluaran tersebut maka dibutuhkan sumber-sumber penerimaan. Sumber penerimaan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana Alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan belanja modal harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD. Sehingga jika Pemerintah Daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal, maka Pemerintah Daerah harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya.

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional di daerahnya masing – masing, hal tersebut menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemerintah Pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing – masing daerah. Salah satu dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran Pemerintah Daerah dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan dana tersebut Pemerintah Daerah menggunakannya untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada publik.

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Penelitian sebelumnya yaitu pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Pemerintah Daerah, studi kasus kabupaten/kota di Jawa dan Bali oleh Abdullah & Halim (2004), didapatkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Penelitian lain dilakukan oleh Darwanto & Yulia Yustikasari (2007) menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dalam penelitian tersebut didapatkan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal dan hubungannya positif. Sedangkan DAU berpengaruh dan hubungannya negatif. Penelitian yang dilakukan Nugroho (2006) menunjukkan bahwa untuk hasil uji secara parsial PAD tidak berpengaruh terhadap prediksi belanja modal sedangkan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap prediksi belanja modal sebesar.

Beberapa penelitian yang dilakukan seringkali memperoleh hasil yang berbeda-beda dan cenderung tidak konsisten satu sama lain. Atas dasar tidak konsistennya hasil temuan beberapa peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal dengan rumusan masalah yaitu apakah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Bagi Peneliti Lainnya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

## Metode

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu Laporan APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet. Dari laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 Kabupaten/Kota tahun 2011. Penelitian ini merupakan penelitian populasi. Variabel Independen dalam penelitian ini yaitu PAD (X1). Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Data PAD didapat dari laporan APBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2011. Variabel kedua yaitu DAU (X2). Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Data DAU didapatkan dari laporan APBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2011, dan variabel ketiga yaitu DAK (X3). Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Angka DAK didapatkan dari laporan APBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2011. Variabel dependen (Y) yaitu belanja modal.

Penelitian ini menggunakan metode analisis yaitu metode analisis deskriptif. Metode ini untuk menggambarkan variabel independen dan dependen secara keseluruhan. Sedangkan untuk menguji hipotesis, dalam penelitian ini menggunakan uji F dan uji t. Alat analisis menggunakan regresi linier berganda (Ghozali, 2005) yang dilakukan dengan SPSS 16. Sebelum menggunakan analisis regresi linier berganda perlu dilakukan uji normalitas dan uji linieritas karena untuk mengetahui apakah analisis regresi linier berganda layak digunakan.

## Hasil dan Pembahasan

Populasi yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dari populasi tersebut diperoleh data untuk dilakukan analisis statistik deskriptif. Berikut

ini merupakan tabel analisis statistik deskriptif : dana alokasi khusus

**Tabel 1.** Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	35	53122.0	427312.0	94184.0	65372.5
DAU	35	262810.0	877475.0	561616.1	170619.8
DAK	35	13569.0	102093.0	58073.5	23681.3
Belanja Modal	35	93784.0	272775.0	146460.8	41138.6

Sumber : Data sekunder yang diolah

Dari statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa jumlah data (n) adalah 35, PAD terkecil (minimum) adalah Rp. 53.122.000.000,00 dan PAD terbesar Rp. 427.312.000.000,00, DAU terkecil adalah Rp. 262.810.000.000,00 dan DAU terbesar Rp. 877.475.000.000,00, DAK terkecil Rp. 13.569.000.000,00 dan DAK terbesar Rp. 102.093.000.000,00, belanja modal terkecil Rp. 93.784.000.000,00 dan belanja modal terbesar Rp. 272.775.000.000,00. Rata-rata PAD sebesar Rp. 94.184.000,00, rata-rata DAU sebesar Rp. 561.616.100.000,00, rata-rata DAK Rp. 58.073.500.000,00 dan rata-rata belanja modal Rp. 146.460.000,00. Jumlah DAU yang lebih besar dari PAD menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan masih belum optimalnya pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi yang ada pada daerah sehingga pendapatan yang dihasilkan masih minim.

Sebelum melakukan pengujian hipotesis perlu dilakukan uji normalitas sebagai uji prasyarat analisis. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang dibentuk dari variabel dependen dan independen mempunyai distribusi normal. Pada uji normalitas diperoleh nilai signifikan sebesar 61,6% yang lebih besar dari 5%. Hal ini berarti bahwa data tersebut berdistribusi normal. Pada uji asumsi klasik terdapat uji autokorelasi, uji multikolinieritas dan analisis regresi berganda. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1. Uji ini menunjukkan nilai DW hitung sebesar 2,053, yang berarti  $1,653 < 2,053 < 2,347$ , dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari autokorelasi. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditentukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji multikolinieritas ini diperoleh nilai tolerance dari masing-masing variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan

yaitu 0.857, 0.642, dan 0.719 yang lebih dari 0,1 dan mempunyai nilai VIF masing-masing 1.168, 1.557, dan 1.390 kurang dari 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas. Pada analisis regresi berganda diperoleh persamaan  $Y = 42909,522 + 0,315PAD + 0,088DAU + 0,422DAK + e$ . Pada pengujian hipotesis dilakukan uji F dan uji t. Uji F dilakukan untuk melihat keberartian pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen atau sering disebut uji kelinieran persamaan regresi. Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak.

Pada tabel 2 menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F dengan hasil nilai signifikansi F sebesar 0,000 di bawah 0,05 yang berarti diterima, secara simultan seluruh variabel independen yaitu PAD, DAU dan DAK berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal. Sedangkan pada uji t dapat dilihat Berdasarkan Tabel 3 tersebut diperoleh nilai signifikansi dari PAD kurang dari 0,05 sehingga berpengaruh terhadap belanja modal dan memiliki arah koefisien positif sehingga searah dengan hipotesis awal. Pada variabel DAU diperoleh nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga berpengaruh terhadap belanja modal dan memiliki arah koefisien positif sesuai dengan hipotesis awal. Pada variabel DAK diperoleh nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa DAK berpengaruh terhadap belanja modal dan memiliki arah koefisien positif yang sesuai dengan hipotesis awal.

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel PAD berpengaruh terhadap belanja modal, dan memiliki arah koefisien positif searah dengan hipotesis awal. Hipotesis tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran Pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi, dan apabila pemerintah daerah memiliki PAD yang rendah maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal juga rendah. Hasil ini sesuai dengan

**Tabel 2.** Uji F

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.165E10	3	1.388E10	27.081	.000a
	Residual	1.589E10	31	5.126E8		
	Total	5.754E10	34			

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: Belanjamodal

**Tabel 3.** Uji T

Model	t	Sig.
(Constant)	3.120	.004
PAD	4.907	.000
DAU	3.097	.004
DAK	2.182	.037

a. Dependent Variable: Belanjamodal

penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara PAD dengan belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi. Sejalan dengan PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa PAD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD, jika pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Antara PAD dengan Belanja Modal terjadi suatu hubungan timbal balik dalam keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula Belanja Modal.

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel DAU berpengaruh terhadap belanja modal dan memiliki arah koefisien positif yang sesuai dengan hipotesis awal. Hipotesis tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi DAU maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) maupun Putro (2011) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi DAU maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et. Al (1985) dalam Harianto dan Adi (2007) menyatakan bahwa ter

dapat keterkaitan antara dana transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Kemudian Gamkar dan Oates (dalam Maimunah, 2006:5) juga menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah. Prakoso (2004) memperoleh bukti empiris bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah yaitu DAU, dengan alokasi pengeluaran daerah melalui alokasi belanja modal. Semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan DAU yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja modal akan meningkat.

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel DAK berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah dan memiliki arah koefisien yang sama dengan hipotesis awal yaitu positif. Hubungan antara DAK dengan belanja modal dapat dijelaskan yaitu, tujuan DAK diperuntukkan untuk program-program nasional di daerah, baik program pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan lingkungan. Contoh untuk program kesehatan berupa program pelayanan dasar di daerah, pemerintah daerah diharapkan untuk pembangunan, peningkatan, dan penyediaan sarana prasarana puskesmas di daerah pelosok. Program nasional pemerintah daerah tersebut termasuk dalam anggaran belanja modal. Sehingga ada keterkaitan DAK yang diperoleh tersebut ditunjukkan untuk program nasional yang merupakan belanja pegawai juga. Jadi semakin tinggi DAK yang diperoleh maka alokasi belanja modal juga semakin meningkat.

Sumber : Data sekunder yang diolah

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R Square*) adalah 0,697 artinya 69,7 % variasi dari semua variabel bebas (PAD, DAU dan DAK) dapat menerangkan variabel terikat (tingkat materialitas), sedangkan sisanya sebesar 0,303 (30,3%) diterangkan oleh

**Tabel 4.** Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted	Std. Error of the Estimate
1	.851 <sup>a</sup>	.724	.697	2.264.160.448

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

Sumber : Data sekunder yang diolah

variabel lain yang tidak diajukkan dalam penelitian ini.

### Kesimpulan

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa PAD berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Variabel DAU berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Dan variabel DAK berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Sehingga pemerintah pusat sebaiknya memberikan kegiatan atau program yang lebih banyak kepada pemerintah daerah agar program tersebut dapat mensejahterakan dan memajukan pemerintah daerah.

Bagi penelitian selanjutnya lebih baik untuk menambahkan variabel lain, selain PAD, DAU dan DAK sebagai variabel yang mempengaruhi belanja modal dengan lebih memperpanjang waktu penelitian sehingga dapat diketahui kecenderungan antar waktu penelitian.

### Daftar Pustaka

- Algifari. 2000. *Analisis Regresi*. Yogyakarta: BPFPE.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". Simposium Nasional Akuntansi 10 Makasar.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi*

*Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2006. *Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi*. Jurnal Akuntansi Pemerintah 2 (1): 53-64.

Kamaluddin, Rustian. 2009. "Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah". Makalah Bappenas: [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id).

Kawendar, Warsito dkk. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mayeztika. 2010. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal". Skripsi Universitas Negeri Semarang.

Suratno, Nugroho. 2010. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". Skripsi Universitas Diponegoro.

Panggabean, Adrian T.,P dkk. 1999. *Distribusi Dana Alokasi Umum (DAU): konsep dan formula alokasi*. Laporan Akhir.

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.

Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sudjana. 2002. *Metode Statistika*. Bandung : Tarsito.

Sugiyono. 2007. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

[www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.